



Wali Kota Libatkan RT/RW untuk Mendata Down Syndrome

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berkomitmen akan mengupayakan proses pendataan anak dengan *down syndrome* di Kota Yogyakarta. Proses pendataan tersebut akan melibatkan lurah maupun RT dan RW untuk melakukan pencermatan di wilayahnya masing-masing.

"Selama ini pendataan masih minim. Jika keberadaan anak *down syndrome* ini saja belum diketahui, bagaimana kebijakan pemerintah bisa sampai sasaran," ucap Haryadi saat dijumpai di ruangannya, Senin (1/4).

Menurut Haryadi, bentuk dukungan yang akan diberikan Pemkot tak ubahnya dengan dukungan yang diberikan pada kalangan *disabilitas*. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Namun, perlu proses pengkajian yang melibatkan beberapa ahli dan elemen masyarakat lainnya untuk

menentukan dukungan nyata apa yang dibutuhkan.

"Kami harus mengkaji dulu apa saja yang mereka butuhkan agar bisa memberikan pelayanan," tandasnya.

Sebelumnya, Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrom (POTADS)DIY telah mengukuhkan keberadaannya bertepatan dengan peringatan Hari Sindroma Down Dunia di Taman Pintar Yogyakarta, Minggu (31/3). Dalam kesempatan itu, mereka berhasil menggandeng 15 keluarga untuk bergabung bersama mengatasi permasalahan anak *down syndrome*.

"Kami mengajak seluruh orangtua agar tidak lagi menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang mengidap *down syndrome*. Semakin minimnya perhatian baik medis dan psikis, maka kondisi anak *down syndrom* akan semakin terpuruk," tegas Ketua Pusat Informasi dan Komunikasi

POTADS DIY, Sri Rejeki Ekasasi dijumpai di sela *talkshow down syndrom*.

Selain sebagai wadah komunikasi, POTADS DIY tengah mengupayakan adanya pendampingan psikis dan medis bagi anak-anak *down syndrome* secara gratis. Sebab, seorang anak *down syndrome* biasanya memerlukan biaya perawatan medis ekstra, sehingga keluarga dengan keterbatasan ekonomi akan sangat kesulitan memberikan perawatan yang sesuai.

"Setiap anak *down syndrome* akan sering menjalani operasi dan perawatan medis lainnya karena menderita setidaknya 11 kelainan fisik bawaan lahir. Ke depannya kami berharap bisa bekerjasama dengan para donatur untuk memberikan pendampingan gratis agar meringankan beban keluarga dengan keterbatasan ekonomi," pungkasnya. (esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005